



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PEMBEKALAN KETUA BPK RI
PADA
ACARA PEMBEKALAN PEJABAT ESELON II DAN III
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SELASA, 18 JANUARI 2011**

Yth. Direktur Jenderal Pajak,

Yth. Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,

Yth. Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,***

Syukur Alhamdulillah, saya bisa hadir dalam acara pembekalan pejabat Eselon II dan III Direktorat Jenderal Pajak pada hari ini. Saya menyambut baik undangan ini apalagi tema yang diangkat adalah **"Menata Direktorat Jenderal Pajak Dengan Governance Yang Lebih Baik Untuk Menghadapi Tantangan Zaman"**. Tema ini sangat relevan dengan kondisi terkini yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembekalan dengan beranjak dari masalah yang dihadapi oleh Ditjen Pajak. Mengawali pembekalan, saya ingin mengajukan pertanyaan yang bersifat pengandaian. Apa jadinya jika pembayar pajak boleh memilih antara membayar pajak ke Ditjen Pajak atau ke tempat lain, katakanlah namanya Ditjen Pajak Reformasi.

Sudah bisa dipastikan, pembayar pajak akan beramai-ramai mengalihkan pembayaran pajaknya ke Ditjen Pajak Reformasi. Masalahnya, beberapa kasus pajak terakhir, terutama yang terkait dengan kasus Gayus Tambunan, telah menghempaskan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak ke titik yang paling dasar.

Ya, kasus "Mafia Pajak" dengan aktor utama Gayus Tambunan telah membuka pandangan orang mengenai carut marut penanganan pajak di Ditjen Pajak. Gayus Tambunan, seorang pegawai golongan III a, diketahui memiliki dana Rp28 milyar yang disimpan di berbagai rekening bank dan Rp75 milyar termasuk emas batangan dan perhiasan yang ditaruh di kotak penyimpanan di bank. Kabarnya, dana itu diduga berasal dari 149 perusahaan yang ia urus keberatan pajaknya.

Saat ini, kasus tersebut terus bergulir di meja hijau untuk membuktikan praktik korupsi yang dilakukan oleh Gayus dan pihak-pihak lain yang terkait. Bagaimana akhir dari kisah sang Gayus ini belum dapat kita ketahui. Namun, tanpa harus menunggu sampai babak akhir kisah tersebut, bagi Ditjen Pajak, termasuk keluarga besarnya, kasus tersebut telah mencoreng kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Akibat kasus tersebut, yang ada di dalam benak masyarakat, adalah pertanyaan bahwa seorang pegawai golongan III a saja sudah demikian kaya, apalagi para atasannya? Bagaimana pula dengan rekan sejawatnya? Pasti sama saja. Inilah serangkaian pertanyaan yang kemudian terpateri sebagai suatu penilaian umum kepada Ditjen pajak.

Jadi, kasus Gayus Tambunan telah membangun *stereotype* terhadap Ditjen Pajak secara keseluruhan. Masyarakat seolah sudah tidak bisa membedakan antara "*suatu kasus*" dengan "*sistem yang berjalan*". Saat ini, masyarakat menilai sistem yang ada di Ditjen Pajak telah rusak dan tidak patut dipercaya. Adanya fenomena masyarakat melalui situs jejaring sosial untuk menggalang pemboikotan membayar pajak, telah membuktikan munculnya *stereotype* ini.

Tantangan bagi Ditjen Pajak saat ini adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak yang telah runtuh tersebut. Harus diakui adanya masalah ini bisa menjadi cobaan/ujian dan juga tantangan bagi Ditjen Pajak.

Menjadi cobaan/ujian artinya dengan berbagai upaya yang dilakukan Ditjen Pajak selama ini untuk mengefektifkan penerimaan pajak, tetap masih ada celah bagi orang-orang yang beritikad tidak baik untuk mengambil keuntungan bagi dirinya dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Bagaimana Ditjen Pajak mengatasi kebocoran tersebut? Inilah cobaan/ ujiannya.

Jika Ditjen Pajak tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang ada, maka kerusakan yang terjadi akan menjadi bertambah parah. Jika Ditjen Pajak tidak kuat menahan cercaan karena adanya kasus pajak tersebut, maka Ditjen Pajak akan makin merasa putus asa dan tidak akan mampu mengambil langkah-langkah perbaikan guna menutup peluang bocornya suatu sistem.

Jika Ditjen pajak segera tanggap terhadap masalah yang terjadi, menggali akar penyebabnya, dan mau mendengar masukan dan kritik dari masyarakat, maka tantangan untuk meraih kondisi yang lebih baik untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat bisa diharapkan akan lekas terwujud. Untuk meraih kepercayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak, yaitu:

1. Bersikap sabar

Ditjen pajak dengan keluarga besarnya harus tetap sabar dengan tetap bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Boleh jadi, saat ini banyak pegawai Ditjen Pajak dan keluarganya merasa malu menjadi pegawai Ditjen Pajak. Kondisi ini jangan sampai berlangsung berkepanjangan dan mengurangi semangat kerja para pegawai. Justru hendaknya masalah yang terjadi semakin memacu semangat untuk bekerja secara lebih keras (giat), dengan cara-cara yang lebih cerdas, dan betul-betul dengan niat ikhlas untuk semata-mata mencari ridhlo Allah, dengan cara mempersembahkan hasil kerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Janganlah kritikan dan cercaan membuat para pegawai Ditjen Pajak melawan dengan berbagai argumentasi, yang pada prinsipnya tidak mau mengakui masalah yang ada. Jika ini yang dilakukan, yakinlah justru kegagalan yang akan dihasilkan, bukan keberhasilan. Dengan sikap sabar dan tetap menjunjung tinggi dedikasi dan komitmen maka Ditjen Pajak akan berubah menjadi lebih baik. Para pegawai Ditjen pajak juga tidak usah malu dengan kondisi yang ada. Akuilah jika ada kekurangan guna memperbaikinya menjadi lebih baik.

2. Meneguhkan Integritas

Tidak dapat dipungkiri dari sekian ribu pegawai Ditjen pajak masih ada yang tidak bisa menjaga kejujuran dan tidak mampu menahan godaan dari pihak tertentu untuk berbuat curang. Hal ini menegaskan bahwa upaya-upaya untuk meneguhkan integritas pegawai dengan berbagai cara harus terus dilakukan. Untuk itu, Ditjen pajak perlu menegakkan kode etik para pegawai Ditjen Pajak. Kode etik tersebut akan mengatur perilaku para pegawai Ditjen Pajak dan juga cara kerjanya agar tidak terjadi tindak kecurangan. Jika ada yang melanggar maka harus diberikan sanksi yang setimpal.

3. Meningkatkan profesionalisme

Untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat, Ditjen Pajak harus melakukan peningkatan pelaksanaan tugas para pegawainya dengan standar-standar profesionalisme sebagai petugas pajak. Ditjen Pajak perlu mengevaluasi kembali sistem yang berjalan saat ini yang meliputi berbagai pedoman, prosedur, dan berbagai petunjuk teknis lainnya. Termasuk disini Ditjen Pajak perlu mengevaluasi dan memperbaiki penggunaan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan pajak. Diharapkan melalui peningkatan profesionalisme akan diperoleh efektifitas penerimaan pajak dan mengurangi kesalahan administrasi maupun kemungkinan penyalahgunaan (kebocoran), serta kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayar.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Itulah beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam rangka meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak. Berkaitan dengan tugas Saudara sebagai petugas pajak, pasti akan banyak tantangan dan godaan. Yang perlu Saudara sadari, Saudara memegang peran penting untuk menunjukkan kepada wajib pajak bagaimana harus membayar pajak yang benar dengan cara menghitung dan memastikan berapa kewajiban pajak yang harus dibayar. Namun, untuk menunjukkan hal tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Bahkan, sering mengantarkan petugas pajak yang tidak kuat iman terjerumus melakukan tindakan yang menyimpang, seperti menerima suap, berkolusi dengan pihak wajib pajak dengan imbalan macam-macam, dan lain-lain. Hendaknya kasus Gayus Tambunan menjadi bahan pembelajaran yang berharga, meskipun pahit rasanya, agar di waktu yang akan datang tidak terjadi lagi hal demikian.

Apalagi, Ditjen Pajak sudah menjalankan Program Reformasi Birokrasi yang salah satunya menerima remunerasi yang sudah memadai jumlahnya.

Sebagaimana sudah saya singgung di depan, tugas yang diemban oleh Saudara sebagai petugas pajak, sungguh merupakan pekerjaan berat. Saudara senantiasa dituntut untuk menjunjung tinggi etika birokrasi yang baik. Dalam pandangan saya, etika birokrasi menuntut adanya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dan peduli. Tanpa kerja keras, Saudara tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Tentu Saudara bukan hanya dituntut asal bekerja saja, namun Saudara juga harus bekerja dengan menggunakan cara dan metode yang tepat. Artinya, Saudara harus dapat bekerja secara cerdas. Selain itu, dalam bekerja, Saudara juga dituntut dapat bersikap ikhlas mengerjakan tugas Saudara.

Dengan bekerja ikhlas, Saudara tidak akan memiliki beban dan mau menerima apa pun hasil pekerjaan Saudara. Jika tidak ikhlas, maka Saudara akan mudah kecewa. Agar mampu bekerja dengan keras, cerdas dan ikhlas, maka Saudara dituntut memiliki sikap peduli, yaitu peduli untuk berperan lebih baik untuk kepentingan orang lain termasuk bekerjasama dengan orang lain.

Perlu saya ingatkan, Saudara-saudara berada pada tempat yang tepat dengan bekerja di Ditjen Pajak. Jika saudara bekerja dengan baik, Saudara bisa membawa perbaikan bagi negara dan bangsa ini. Sebab, dengan penerimaan pajak yang lebih besar sebagai hasil kerja Saudara, maka negara ini semakin memiliki banyak dana yang akan dipakai untuk pembangunan. Pada gilirannya, jika pembangunan bisa terus meningkat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, maka cita-cita bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dapat lebih cepat terlaksana. Jika melalui apa yang Saudara kerjakan, Saudara bisa menyumbang proses perbaikan kemakmuran rakyat, maka saya berkeyakinan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa akan mengalir terus-menerus kepada Saudara. Inilah yang disebut dengan *amal jariyah*.

Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Itulah beberapa hal yang saya sampaikan dalam pembekalan hari ini. Mudah-mudahan Saudara bisa mempelajari pembekalan ini untuk memperbaiki kinerja tugas Saudara di Ditjen Pajak. Saya sebagai mantan Dirjen Pajak yang saat ini menjadi Ketua BPK, suatu lembaga Negara yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, mempunyai keinginan agar Ditjen Pajak bisa menjadi direktorat yang mampu mengelola perpajakan dengan lebih optimal.

Saya juga mendoakan agar kasus yang terjadi di Ditjen Pajak tidak terjadi lagi sehingga melalui upaya-upaya yang sudah saya sampaikan tadi, Ditjen Pajak mampu merengkuh kembali kepercayaan rakyat terhadap Ditjen pajak.

Saya berpesan agar motto Ditjen Pajak yang menyatakan "Hari gini tidak bayar pajak? Apa kata dunia?" tidak berganti menjadi "Hari gini bayar pajak? Apa kata Gayus?"

Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Saudara.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oom Ćanti Ćanti Ćanti Oom

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Drs. Hadi Poernomo, Ak.